

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 dan secara rutin dipublikasikan dalam laporan *Human Development Report* (HDR) (Badan Pusat Statistik, 2022). Indeks ini, yang juga dikenal sebagai *Human Development Index* (HDI), digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia di setiap wilayah. IPM mencakup tiga komponen utama: kesehatan, pencapaian pendidikan, dan standar kehidupan yang sering dikaitkan dengan aspek ekonomi. Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan daerah untuk meningkatkan IPM.¹

IPM merupakan indikator kunci dalam menilai kemajuan pembangunan manusia. Banyak negara menerapkan konsep pembangunan manusia yang dipelopori oleh UNDP, dan Indonesia juga berperan dalam menerapkan konsep tersebut. Indonesia mulai menghitung IPM untuk pertama kalinya pada tahun 1996. Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru pada

¹ <https://bps.go.id> diakses pada 26 November 2023, pk1 20.20 WIB

tahun 2014. Indikator dalam perhitungan IPM di Indonesia meliputi angka harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran perkapita yang mewakili dimensi standar hidup layak.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Pencapaian IPM Provinsi Banten pada Tahun 2021: Kab Pandeglang 65,17, Kab Lebak 64,03, Kab Tangerang 72,29, Kab Serang 66,82, Kota Tangerang 78,50, Kota Cilegon 73,35, Kota Serang 72,44, kota Tangerang Selatan 81,60.³

Pencapaian IPM di Provinsi Banten khususnya pada tingkat pada Tahun 2021 memiliki angka yang berbeda beda. Perbedaan ini umumnya terjadi karena 3 faktor yaitu indeks Pengetahuan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Standar kehidupan. Status IPM bisa dikatakan sangat tinggi apabila $IPM \geq 80$.

Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan nilai IPM Indonesia. Pemerintah perlu memprioritaskan pendidikan, sosial, dan kesehatan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal

² Noor Andi Fakhruddin Yusuf, “*Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta*”, Skripsi, (Semarang, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014), h. 54.

³ <https://banten.bps.go.id> diakses pada 26 November 2023, pk1 20.20 WIB

34 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Juga dipertegas kembali dalam pasal 34 ayat 2 bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Kemudian dibalik adanya aturan diatas, ada sebuah kebijakan yang bersifat memaksa terhadap rakyatnya yaitu pajak. disetiap daerah tentu masyarakat dibebani oleh adanya pajak. Pajak Daerah adalah bentuk wujud UU No.32 Tahun 2004 tentang pemeritahan daerah, dimana pasal 1 membahas mengenai desentralisasi dan perimbangan keuangan daerah. Memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya. Termasuk dalam keleluasan mengelola keuangan daerah sebagai modal utama pembangunan. Pembangunan ini yang diharapkan agar tersalurkan merata dan dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya ada permasalahan yang tidak bisa diabaikan dalam IPM yaitu jumlah penduduk, seperti kita ketahui jumlah penduduk di Provinsi Banten yang bisa dikatakan tinggi. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk pada 2022 sekitar 12.167.040.⁴ Jumlah ini cukup terbilang tinggi dan apabila diabaikan

⁴ <https://banten.bps.go.id> diakses pada 26 November 2023, pk1 20.30 WIB

ini akan berdampak pada wilayah penduduk yang padat. Dan kemungkinan akan berdampak pula pada nilai IPM karena banyaknya manusia disuatu wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Kepadatan Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera diatas, maka sang peneliti mencantumkan rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Bagaimana Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten?
- 2) Bagaimana Kepadatan Penduduk berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten?
- 3) Bagaimana Pandangan Islam mengenai Pajak, Kepadatan Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.
- 3) Untuk mengetahui pandangan islam mengenai Pajak, Kepadatan Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB Ke-satu : Pendahuluan. Pada bagian ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB Ke-dua : Kajian Teoretis. Bab ini merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai pajak daerah, indeks pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi syariah, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB Ke-tiga : Metodologi Penelitian. Pada Bab ini membahas mengenai data dan sumber data, populasi dan sampel, serta metode uji data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB Ke-empat : Analisis Dan Pembahasan. Bab ini membahas mengenai data penelitian dan temuan penelitian terkait hasil uji pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

BAB Ke-lima : Kesimpulan dan Saran. Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.